



Evaluasi Proses Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) : *Literatur Review*

Anisya Febriyanti ¹, Muhammad Fawwaz ², Tania Rahmayanti ³, Novita Dwi Istanti ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Korespondensi penulis : 2010713026@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *UUD 1945 that the government must provide a sense of well-being and health to all members of society, this is implemented in the National Health Insurance implemented by the Health Social Security Administration Agency (BPJS). FKTP is at the forefront of providing health services in Indonesia. This study aims to evaluate the national health insurance referral system at FKTP. The research design used in this study was a literature review using Google scholar to search for previous related articles. The related article criteria used were those published from 2017-2023 and collected as many as 6 journals. Based on the six journals, the results show that the National Health Insurance Referral system at First Level Health Facilities (FKTP) has been running well in the community even though in its implementation there are still deficiencies in FKTP.*

Keywords: *Referral System, National health insurance, FKTP.*

Abstrak. Undang-Undang Dasar 1945 memuat bahwa pemerintah harus memberikan rasa sejahtera dan sehat kepada seluruh kalangan masyarakat, hal ini diimplementasikan dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan. FKTP sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem rujukan jaminan kesehatan nasional pada FKTP. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu literature review dengan menggunakan Google scholar dalam mencari artikel terkait terdahulu. Kriteria artikel terkait yang digunakan yaitu yang diterbitkan dari tahun 2017-2023 dan terkumpul sebanyak 6 jurnal. Berdasarkan keenam jurnal tersebut didapatkan hasil bahwa sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sudah berjalan dengan baik di masyarakat walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan di FKTP.

Kata kunci: Sistem Rujukan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah Indonesia diharapkan dapat mensejahterakan masyarakatnya secara menyeluruh, salah satu bukti yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membuat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menjamin

Received Maret 12, 2023; Revised April 25, 2023; Accepted Mei 27, 2023

* Anisya Febriyanti, 2010713026@mahasiswa.upnvj.ac.id

kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memenuhi kebutuhan dasar yang layak (930-3316). Salah satu program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu dengan dibentuknya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan diadakannya Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pelayanan kesehatan. Hal tersebut disebabkan semakin berkembangnya zaman kesadaran masyarakat Indonesia terus meningkat terhadap pentingnya penggunaan jaminan kesehatan nasional. Jaminan kesehatan nasional menggunakan sistem asuransi kesehatan yang dimana masyarakat Indonesia yang menggunakan program tersebut wajib membayar iuran yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara. Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat digunakan pada sistem rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

FKTP merupakan pelayanan kesehatan untuk perorangan dan bersifat non spesialis. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi rawat jalan dan rawat inap pada Puskesmas, Praktek Dokter, Dokter Gigi, Klinik Pratama atau yang setara, dan Rumah Sakit Kelas D. FKTP selaku pemberi layanan kesehatan tingkat pertama diwajibkan memberikan pelayanan yang menyeluruh, hal tersebut meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif pelayanan kebidanan dan pelayanan kesehatan darurat medis serta pelayanan penunjang lainnya yang meliputi pelayanan kefarmasian dan pelayanan laboratorium sederhana. Program JKN menerapkan sistem pelayanan kesehatan berjenjang, artinya setiap pasien atau peserta JKN tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), pasien atau peserta JKN harus melewati tahap sistem rujukan terlebih dahulu. Diberlakukannya sistem rujukan pada program JKN dimaksudkan agar dapat mengendalikan mutu dan biaya pelayanan kesehatan. Pada pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional hal yang perlu menjadi fokus utama pada pelaksanaannya adalah pemberi layanan kesehatan dalam hal ini FKTP. Pemberi layanan kesehatan akan dinilai bagaimana kualitas dan kinerjanya oleh peserta/pasien pengguna JKN.

Berdasarkan (sumber: 897) kualitas pelayanan kesehatan pada sistem rujukan bagi peserta JKN pada FKTP masih berada pada persentase 65-80%. Banyak peserta yang mengeluhkan bahwa pelayanan masih kurang baik seperti waktu tunggu yang terlalu lama. Pada kenyataannya peserta JKN pada FKTP sangat mengharapkan pelayanan kesehatan yang diberikan maksimal. Oleh karena itu, tujuan diadakannya penelitian ini

agar dapat mengevaluasi sistem rujukan jaminan kesehatan nasional pada FKTP. Penelitian dilakukan agar dapat mengukur tingkat kesesuaian pada prosedur sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan dan dapat mengukur tingkat kepuasan pasien peserta JKN. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana perbaikan pada prosedur sistem rujukan pelayanan kesehatan.

KAJIAN TEORITIS

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Luluk, S. (2021) Sistem rujukan pelayanan kesehatan mulai diimplementasikan pada tahun 2014 melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah sakit Rujukan Nasional. Keputusan menteri tersebut menjelaskan bahwa strategi sistem rujukan pada tahun 2017 dilakukan dengan memetakan rumah sakit rujukan nasional, provinsi, dan regional. Namun, pada tahun 2019, sistem rujukan pada pelayanan kesehatan masih memerlukan penguatan dari berbagai sistem akibat dari ketidakjelasan hubungan dengan sistem jaminan sosial yang ada. Sistem rujukan merupakan sebuah sistem penyelenggaraan kesehatan yang mana mengatur proses penyerahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Sistem rujukan pelayanan kesehatan seharusnya penyerahan dari satu pelayanan kesehatan ke pelayanan kesehatan lainnya yang lebih baik/memadai. Sistem rujukan ditujukan untuk memberikan pelayanan yang bermutu tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Sistem rujukan pelayanan kesehatan bersifat multi sektor dan multi disiplin.

Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai ditetapkan pada 1 Januari 2014. JKN memiliki badan hukum sendiri yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yaitu Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 Maharani Putri et al., (2019). JKN ditujukan untuk memenuhi cakupan kesehatan semesta, dalam artian bahwa setiap masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan secara menyeluruh mulai dari layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Diharapkan dengan adanya program JKN masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat menuju

pelayanan kesehatan sesuai yang dibutuhkannya Vianny (2019). Setelah hampir 10 tahun negara Indonesia yang memberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional, jumlah masyarakat yang menjadi peserta JKN sebesar 90,79% atau sekitar 252,17 juta jiwa dari total keseluruhan penduduk di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa program JKN sudah berhasil mencakup seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Jaminan Keseha

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan fasilitas pelayanan yang melayani kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik atau pelayanan primer meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada puskesmas, Praktek Dokter, Praktek Dokter Gigi, Klinik Pratama termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/POLRI dan Rumah Sakit Kelas D (Irawati Indrianingrum, 2021). Sebelum pasien mendapatkan pelayanan lebih lanjut di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), pasien terlebih dahulu perlu mempersiapkan beberapa prosedur rujukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Khotimatul Khusna, 2019). FKTP menjadi yang terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, sehingga tuntutan terhadap fasilitas pelayanan prima menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh FKTP terutama dalam hal saran prasarana (Risky, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Literature Review*. Analisis penelitian ini berdasarkan temuan penelitian pada hal-hal pokok pembahasan yang relevan dan sesuai dengan topik yang diteliti. Pencarian sumber data untuk jurnal *Literature Review* ini, peneliti memilih jurnal-jurnal terbaru pada rentang waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 agar peneliti dapat mengkaji dan menggunakannya sebagai referensi penelitian terbaru. Peneliti menggunakan situs pencarian melalui database online Google Scholar sehingga mendapatkan 6 jurnal penelitian nasional dengan kata kunci sistem rujukan, JKN, FKTP. Dengan memperoleh 6 jurnal yang sesuai, peneliti mengelompokkan dan menganalisis jurnal yang terpilih tersebut ke dalam tabel yang berisi nama peneliti, tahun terbit, judul, metode penelitian, dan hasil penelitian. Selanjutnya, peneliti akan membahas hasil temuan baru yang nantinya digunakan sebagai perbandingan antara satu sumber dengan sumber lainnya, dan diakhir peneliti akan

menarik kesimpulannya. Sehingga peneliti dapat menganalisis dan memperoleh informasi mengenai topik yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Evaluasi Proses Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1	Pertiwi et al., 2017	Analisis Implementasi Program Rujuk Balik Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.	Kuantitatif Deskriptif.	Berdasarkan hasil penelitian implementasi program rujuk balik pendaftaran peserta PRB yang seharusnya dilakukan oleh BPJS Kesehatan pada kenyataannya dilakukan oleh FKTP karena belum diterapkannya Pojok PRB sebagai fasilitas pendaftaran peserta PRB di FKTL. Pelayanan PRB juga masih ada yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan rujuk balik. Hal ini berkaitan dengan faktor sumber daya di mana fasilitas obat di FKTP memang masih sering kosong ketersediaannya.
2	Indrianingrum & Puspitasari, 2021	Evaluasi Proses Sistem Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Jepara.	Deskriptif Kualitatif.	Hasil penelitian terkait pelayanan rujukan sesuai dengan indikasi medis pada peserta BPJS Kesehatan mengatakan untuk pelayanan rujukan peserta BPJS Kesehatan itu sendiri sudah sesuai dengan indikasi medis dan kapasitas dokter yang memeriksa apabila kompetensi diluar 144 diagnosa/jenis penyakit/spesialistik dan rujukan tidak atas permintaan pasien.
3	Di & Karimun, 2022	Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Sistem Rujukan Kesehatan Masyarakat Miskin Antar Pulau Di Kabupaten Karimun.	Kuantitatif Deskriptif.	Berdasarkan dari hasil penelitian ini, pelaksanaan rujukan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Karimun selama ini telah berjalan dengan baik dan sudah mengatur semua hal-hal tentang rujukan kesehatan masyarakat miskin namun peneliti menilai masih ada hal-hal yang belum terakomodir dalam kebijakan ini sehingga didalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala ataupun permasalahan yang ditemukan.

4	Irfan permana et al., 2019	Evaluasi Pelaksanaan Sistem Rujukan Rawat Jalan Non-Spesialistik Bagi Peserta BPJS Di Puskesmas Rambah Hilir I Kabupaten Rokan Hulu.	Kualitatif.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi Pelaksanaan Sistem Rujukan Rawat Jalan Non-Spesialistik Bagi Peserta BPJS di Puskesmas Rambah Hilir I Tahun 2018, maka penulis menarik kesimpulan bahwa ketersediaan SDM di Puskesmas Rambah Hilir I belum sesuai dengan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Dilihat dari segi penempatan, tanggung jawab yang belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki merupakan masalah yang dihadapi oleh Puskesmas Rambah Hilir I. Hal inilah yang mempengaruhi tingginya angka rujukan ke faskes lanjutan di Puskesmas Rambah Hilir I.
5	Setiawati & Nurriszka, 2019	Evaluasi Pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.	Observasi	Berdasarkan hasil observasi penelitian ini menemukan masih banyak persoalan dalam pelaksanaan sistem rujukan berjenjang di FKTP. Pelayanan yang diberikan oleh FKTP belum optimal karena tidak seimbang antara jumlah pasien yang dilayani dan petugas dan infrastruktur pelayanan kesehatan. Berdasarkan variabel kelompok umur, semua pasien yang masuk kelompok umur remaja memiliki tingkat kepuasan rendah. Pada kelompok umur dewasa, tingkat kepuasan rendah mencapai 50%. Sedangkan, kelompok umur lansia, tingkat kepuasan rendah mencapai 33,3%. Hanya pra lansia yang tingkat kepuasannya tinggi mencapai 50%.
6	Indrianingrum & Handayani, 2017	Input Sistem Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Jepara.	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan penelitian terhadap pelayanan rujukan sudah sesuai alur rujukan dan dilakukan secara berjenjang dan obat yang diberikan pada peserta BPJS Kesehatan obat generik dan obat diberikan sesuai indikasi medis serta dalam penyediaan obat dari kapitasi. Rujukan BPJS Kesehatan tidak ada penambahan biaya, sesuai kelas, sesuai dengan kapitasi dan kepesertaan yang terdaftar.

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat disimpulkan Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sudah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Sistem rujukan di

rumah sakit merupakan pelimpahan tugas dan tanggung jawab. Artinya rujukan pelayanan kesehatan menjamin proses penanganan pasien yang sesuai dengan kompetensi rumah sakit atau petugas medis. Akan terjadi timbal balik baik dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi oleh rumah sakit level tinggi ke level rendah. Disamping itu rumah sakit dengan level yang lebih tinggi akan lebih memfokuskan pelayanan pada keunggulan yang dimilikinya. Sementara itu rujukan juga dapat berlangsung antara fungsional dengan struktural. Permasalahan-permasalahan manajerial rumah sakit yang tidak dapat ditangani oleh unit struktural sebaiknya dilimpahkan ke unit fungsional dan sebaliknya. Proses sistem rujukan pada FKTP yang berjalan perlu dilakukan evaluasi.

Hasil identifikasi artikel penelitian menunjukkan bahwa Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di beberapa daerah sudah berjalan dengan baik, disamping itu masih ada juga FKTP di daerah - daerah yang memang masyarakatnya belum mendapatkan pelayanan yang maksimal dari suatu sistem pelayanan rujukan ini. Puskesmas Rambah Hilir I merupakan salah satu FKTP yang belum sesuai dengan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari segi penempatan, tanggung jawab yang belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penempatan yang belum merata menjadi penyebab munculnya masalah belum tercapainya kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan standar yang berlaku (Irfan permana et al., 2019).

Penerapan sistem rujukan pada FKTP juga belum berjalan dengan maksimal di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Kota Magelang, hal tersebut disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian pedoman pelaksanaan sistem rujukan dan banyaknya miskomunikasi yang terjadi antara dokter spesialis dan dokter umum serta dari segi tenaga kerja RSUD Tidar masih dirasa kurang karena masih banyaknya jumlah pasien yang menumpuk. Berbeda halnya dengan sistem rujukan BPJS Kesehatan di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Karimun, dapat dikatakan bahwa sistem rujukan pada FKTP Kabupaten Jepara dan Kabupaten Karimun sudah sesuai dengan pedoman dan alur rujukan sehingga tidak ada pasien yang menumpuk dan fasilitas pelayanan kesehatan pada sistem rujukan jaminan kesehatan nasional sudah diberikan dengan baik untuk program rujukan yang dilakukan. SDM atau tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Karimun juga sudah bekerja dengan baik walaupun masih kekurangan tenaga kesehatan seperti dokter spesialis .

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka disimpulkan bahwa Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sudah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat dari segi penempatan, tanggung jawab yang belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan di FKTP perlu segera diperbaiki. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan kesehatan di FKTP. Sosialisasi harus intensif dilakukan kepada masyarakat agar mereka memahami prosedur sistem rujukan berjenjang yang berlaku dalam JKN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Apt. Riswandy Wasir, Ph. D dan Dr. Novita Dwi Istanti, SKM, MARS selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan yang telah memberikan bimbingan, masukan dan bantuan dalam menyusun artikel ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk penulis dapatkan, agar penulis terus belajar. Semoga artikel yang penulis buat dapat bermanfaat pembaca dan semua yang membutuhkan.

DAFTAR REFERENSI

- Di, P., & Karimun, K. (2022). *Online ISSN 2746-8453*. 692–706.
- Indrianingrum, I., & Handayani, O. W. K. (2017). Input Sistem Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Jepara. *Public Health Perspective Journal*, 2(2), 140–147.
- Indrianingrum, I., & Puspitasari, I. (2021). Evaluasi Proses Sistem Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Fktp) Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(1), 78. <https://doi.org/10.26751/jikk.v12i1.930>
- Irfan permana, Aprilia Rohman, A., & Rohita, T. (2019). Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Penurunan Fungsi Kognitif Pada Lansia. *Bina Generasi : Jurnal Kesehatan*, 11(01), 55–62. <https://doi.org/10.35907/jksbg.v11i01.143>

- Pertiwi, D., Wigati, A., Fatmasari, Y., Administrasi, P., & Kesehatan, K. (2017). Analisis Implementasi Program Rujuk Balik Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)*, 5(3), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Risky, S. (2022). Upaya Penataan Sistem Rujukan Kesehatan Yang Efektif dan Terstruktur di Sulawesi Tenggara.
- Setiawati, M. E., & Nurriszka, R. H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 08(01), 35–40.
- Maharani Putri, P., Bayu Murdi, P., & Kesehatan di Era, P. (2019). [WACANA HUKUM: *JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI*] (Vol. 25, Issue 1).
- Luluk, Luluk S. "Sistem Rujukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Maternal Perinatal di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pamenang*, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 6-16.